

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

1. Selama tahun 1999-2024 perkembangan kredit modal kerja di bank umum Indonesia rata-rata mencapai 12,09 persen setiap tahunnya, suku bunga kredit rata-rata perkembangannya sebesar 13,37 persen pertahun, perkembangan inflasi rata-rata berada di 5,79 persen pertahun dan non performing loan rata-rata perkembangannya sebesar 5,68 persen pertahun.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga kredit dan Non-Performing Loan berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit modal kerja di bank umum Indonesia. Namun, inflasi ditemukan tidak berpengaruh signifikan.

6.2 Saran

1. Bank Indonesia diharapkan melaksanakan langkah-langkah kebijakan moneter yang cermat untuk secara perlahan dan terencana menurunkan suku bunga dengan cara menurunkan suku bunga acuan (BI 7-Day Reverse Repo Rate) sambil terus memantau stabilitas inflasi dan kondisi sistem perbankan. Di samping itu, Bank Indonesia harus mampu meningkatkan likuiditas dalam perbankan melalui operasi pasar terbuka, sehingga bank-bank umum memperoleh sumber dana yang lebih terjangkau dan bisa memberikan suku bunga pinjaman yang lebih rendah kepada para debitur. Kolaborasi dengan pemerintah dalam mengendalikan inflasi serta menjaga kestabilan makroekonomi juga sangat vital agar penurunan suku bunga tidak memunculkan risiko inflasi yang tinggi serta ketidakstabilan ekonomi.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga penegak hukum harus mempercepat proses investigasi dan memberikan sanksi tegas bagi oknum yang terlibat dalam kejahatan perbankan. Ketegasan hukum ini akan memberikan efek jera yang kuat. Selain itu, bank umum perlu meningkatkan pengelolaan risiko kredit secara menyeluruh agar hubungan

antara Non Performing Loan (NPL) dan kredit modal kerja (KMK) menjadi negatif, sehingga ketika NPL turun KMK naik atau sebaliknya. Restrukturisasi kredit harus dijadikan salah satu pendekatan yang efektif dalam menangani masalah kredit, seperti penjadwalan ulang pembayaran, penyesuaian suku bunga atau modifikasi persyaratan kredit sesuai dengan kapabilitas debitur, serta memastikan dokumentasi yang lengkap akan memperkuat manajemen risiko. Penyelesaian masalah ini sangat bergantung pada komitmen bank untuk memperbaiki Good Corporate Governance (GCG). Bank harus membangun budaya integritas yang kuat dan menyediakan saluran pelaporan kecurangan (whistleblowing system) yang aman dan efektif bagi para karyawannya.